

## Antisipasi KLB, Dinkes Pastikan Imunisasi Campak Gratis

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meminta warga untuk segera melakukan imunisasi campak kepada anak-anak. Anjuran tersebut guna mengantisipasi lonjakan kasus campak secara nasional.

“Yang paling utama, lengkapi imunisasi campak rubella segera. Gratis dari pemerintah di puskesmas atau layanan imunisasi terdekat,” kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI, Ngabila Salama, Jumat (20/1).

Permintaan itu karena data terakhir dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 12 provinsi menetapkan kejadian luar biasa (KLB) atas campak. Dia menjelaskan imunisasi diberikan tiga kali pada usia sembilan bulan, 18 bulan dan kelas satu sekolah dasar (SD).

Menurut dia, sebanyak 75 persen campak mengenai balita, kemudian sebanyak 20 persen anak SD dan lima persen pada dewasa. “Sehingga penting menyisir dan melengkapi imunisasi campak rubella balita dan anak SD,” ucapnya.

Apabila anak demam disertai keluar bintik merah pada kulit atau kemerahan pada mata, batuk, dan pilek segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hal itu untuk diobati dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau jika diperlukan pengambilan sampel darah untuk diagnosis.

“Warga dan kader dapat melaporkan kasus campak kepada puskesmas kecamatan terdekat,” katanya.

Ia menyebut, peningkatan kasus campak salah satunya didorong menurunnya cakupan vaksinasi campak saat pandemi pada 2020-2022. “Di Jakarta pada 2022, campak mulai meningkat pada September, Oktober, November 2022 dan menurun pada Desember 2022,” katanya tanpa menyebutkan detail rincian kasus campak di Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan sebanyak 53 KLB campak ditetapkan oleh 34 kabupaten/kota di 12 provinsi. Kemudian, ada 10 KLB rubella di 10 kabupaten/kota di delapan provinsi.

Sementara itu, DKI Jakarta belum termasuk di antara daerah yang menetapkan KLB campak dan rubella. KLB Campak ditetapkan oleh pemerintah daerah tetangga DKI Jakarta di antaranya Bogor, Bandung Barat dan Bekasi. Selanjutnya di Provinsi Banten yakni di Kota Serang, Lebak, Kabupaten Serang dan Pandeglang.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan KLB dapat ditetapkan apabila minimal terjadi lima kasus campak di suatu wilayah. Hingga saat ini pemerintah belum berencana menetapkan status KLB se-Indonesia. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## PELATNAS WUSHU JELANG SEA GAMES 2023

Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari (ketiga kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI), Ngatino (kedua kanan), Ketua Bidang Luar Negeri PBWI, Karan Sukarno Wibing (ketiga kiri) berbiang dengan sejumlah atlet wushu saat berkunjung pada pemusatan latihan nasional wushu jelang SEA Games 2023 di GBK Arena, Jakarta, Jumat (20/1). PBWI menargetkan empat emas dalam SEA Games 2023 yang berlangsung pada 5-17 Mei mendatang di Phnom Penh, Kamboja.

## HERU: DITERAPKAN SECARA BERTAHAP

# Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta Tambah Beban Rakyat

Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak, sangat mungkin bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat,” kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat.

JAKARTA (IM) - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di 25 ruas jalan di Jakarta. Di saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat.

“Pemberlakuan jalan berbayar yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tidak akan efektif. Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat secara cepat dan paksa,” ujar Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (20/1).

Dia menjelaskan, aturan ERP seperti pengguna jalan ‘dipalak’ oleh Pemprov DKI. Menurut Mirah, kemacetan di Ibu Kota tidak akan bisa dihindarkan karena ruas jalan memang terbatas dan jumlah

kendaraan yang melintas juga banyak. Dia menyoroti isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), yang mengecualikan angkutan umum berpelat kuning.

Artinya, ojek online (ojol) dan kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan akan terbebani biaya jalan berbayar. Pihaknya memperkirakan perusahaan mungkin membebani biaya jalan berbayar kepada konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan biaya jalan berbayar juga dibebankan kepada pengemudi ojol atau kurir.

Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak, kata Mirah, sangat mungkin bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat,” ujarnya.

Pemberlakuan ERP yang setiap hari mulai pukul 05.00 sampai pukul 22.00 WIB, kata dia, sama saja Pemprov

DKI membebani mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rejeki tanpa pandang bulu. “Aspek Indonesia juga memiliki anggota pengemudi daring dan kurir yang telah menyampaikan aspirasi keberatan kami untuk disampaikan kepada Pemerintah DKI,” kata Mirah.

### Secara Bertahap

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 titik ruas bakal diterapkan secara bertahap. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara pasti kapan diterapkan, bisa saja beberapa tahun lagi.

“ERP walaupun tahapannya enggak tahu sampai tahun berapa itu, sampai 25 titik kan secara bertahap,” kata Heru kepada wartawan di Kembangan Selatan, Jumat (20/1). Heru menambahkan, bahwa regulasi lengkap terkait ERP masih digodok bersama DPRD DKI. “Masih dalam proses (pembahasan ERP) belum jalan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eks Wali Kota Jakarta Utara itu memprioritaskan pemanfaatan transportasi umum untuk mengatasi permasalahan kemacetan Ibu Kota. “Yang diutamakan itu yang sudah ada Transjakarta, sudah ada MRT, yang sudah

ada LRT, itu yang kita utamakan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kebijakan ini dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota dalam bentuk ‘push strategy’, yaitu strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Adapun usulan besaran tarif ERP dari Dishub DKI sebesar Rp5.000-19.900.

Adapun kebijakan ERP tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PPLE) yang ditetapkan Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan. Kebijakan ERP mengatur pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu. “Pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat,” bunyi pasal 10 Ayat (1) dalam Raperda tersebut.

Dalam Raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP. Berikut ini daftarnya:

1. Jalan Pintu Besar Selatan.
2. Jalan Gajah mada.
3. Jalan Hayam Wuruk.
4. Jalan Kyai Majapahit.
5. Jalan Medan Merdeka Barat.
6. Jalan Moh. Husni Thamrin.
7. Jalan Jenderal Sudirman.
8. Jalan Sisirgamaraja.
9. Jalan Panglima Polim.
10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang).
11. Jalan Suryopranoto.
12. Jalan Balikpapan.
13. Jalan Kyai Caringin.
14. Jalan Tomang Raya.
15. Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto).
16. Jalan Gatot Subroto.
17. Jalan M.T Haryono.
18. Jalan DI Panjaitan.
19. Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan).
20. Jalan Pramuka.
21. Jalan Salemba Raya.
22. Jalan Kramat Raya.
23. Jalan Pasar Senen.
24. Jalan Gunung Sahari.
25. Jalan HR Rasuna Said. ● yan

## BPBD DKI Jakarta Siagakan 267 Tim Reaksi Cepat Antisipasi Banjir

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menyiagakan sebanyak 267 tim reaksi cepat (TRC) di setiap kelurahan Jakarta untuk mengantisipasi banjir sesuai peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana,” kata Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI, Michael Sitanggang di Jakarta, Jumat (20/1).

Upaya lain yang disiapkan BPBD DKI untuk antisipasi puncak cuaca ekstrem di antaranya melakukan koordinasi dengan BNPB, BMKG, para wali kota/bupati untuk menjalin kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, memberikan informasi dinamika kondisi cuaca dan peringatan dini terkait kenaikan tinggi muka air melalui peringatan dini bencana (DEWS) dan informasi pesan singkat serta peringatan dini cuaca melalui website,

media sosial, pesan aplikasi WhatsApp dan Telegram.

“Kami juga mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir kepada setiap kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir, seperti perahu, ring buoys (ban pelampung), jaket pelampung dan lainnya,” ucapnya.

Pihaknya juga memastikan kesiapan posko penanganan bencana dan lokasi-lokasi pengungsian termasuk kelengkapan pendukung yang ada di tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan untuk siaga dan diaktifkan saat terjadi bencana.

Di sisi lain, BPBD DKI mengimbau masyarakat menyiapkan perlindungan khususnya yang akan beraktivitas di luar ruangan, seperti membawa payung, jaket, topi, ataupun jas hujan. Selain itu, bagi para pejalan kaki dan pengguna kendaraan agar menjauhi area sekitar saluran air atau gorong-gorong terbuka untuk menghindari terjadinya kejadian terpesok.

Pihaknya meminta masyarakat agar selalu memantau informasi perkembangan cuaca yang disampaikan BPBD DKI melalui laman [bpbddki.jakarta.go.id](http://bpbddki.jakarta.go.id) dan media sosial BPBD. Selain itu, kanal pengaduan darurat di antaranya melalui sambungan telepon di 112 atau melalui aplikasi JAKI untuk melaporkan kejadian banjir atau genangan.

Sebelumnya, BMKG menerbitkan peringatan dini terkait banjir dan potensi hujan petir di wilayah lainnya di DKI. ● yan



## RENCANA PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN DI KALI PESANGGRAHAN

Foto aerial sejumlah kendaraan melintas di dekat kali Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (20/1). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun dinding penahan sepanjang 1.400 meter di bantaran kali Pesanggrahan untuk mencegah air meluap ke jalanan saat terjadi banjir.

## LRT Beroperasi Juli 2023, DPR Harap Bisa Urai Kemacetan di Jabodetabek

JAKARTA (IM) - Light Rail Transit (LRT) Jabodebek ditargetkan beroperasi Juli 2023 mendatang. Kehadirannya diharapkan dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Saat ini, KAI bersama para pihak tengah mempersiapkan segala sesuatu terkait pengoperasian LRT. Baik sarana, prasarana, fasilitas pelayanan penumpang maupun perizinan perizinan yang diperlukan.

“Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, tentu kehadiran LRT Jabodebek sangat diantarkan untuk mendukung kegiatan bertransportasi masyarakat yang aman, nyaman dan bebas macet,” terang Anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi, dalam keterangannya, Jumat (20/1).

Hal itu disampaikan Intan dalam sosialisasi yang mengangkat tema ‘Kereta Cepat untuk Indonesia Maju’ di Cilandak, Kota Depok. Kegiatan yang diselenggarakan pada Rabu (18/1) itu diikuti 150 peserta warga Kelurahan Sukamaju.

Diungkapkan, salah satu moda transportasi paling modern itu akan dioperasikan menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC), yaitu pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem

dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis serta disupervisi juga secara otomatis dari pusat kendali operasi.

Serta Grade of Automation level 3, tingkat otomasi operasional kereta di mana pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis, namun mensyaratkan masih terdapat petugas operasional di dalam kereta untuk penanganan kondisi darurat dan pelayanan kepada pelanggan. Petugas ini disebut Train Attendant.

KAI berencana mengoperasikan hingga 27 trainset LRT Jabodebek per hari, di mana dalam 1 trainset terdiri dari 6 unit kereta. Dengan demikian akan terdapat 560 perjalanan LRT Jabodebek yang akan melayani 114.000 pelanggan per hari.

“Jika kondisi padat, LRT Jabodebek dapat menampung penumpang lebih dari seribu pelanggan,” jelas Intan Fauzi merujuk data KAI.

Anggota Fraksi PAN itu menambahkan, ada 18 stasiun yang akan dilewati LRT Jabodebek. Yakni Stasiun Dukuh Atas, Setia Budi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMI, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jatimulya. ● yan



## HIASAN IMLEK DI KAMPUNG DEPOK

Pengendara melewati gapura dengan permak-pernik imlek di Gang Haji Bona, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/1). Warga keturunan Tionghoa di kampung tersebut menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2574 dengan membuat mural dan menghias gapura serta jalan dengan permak-pernik imlek.

### PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT DUTA SAHABAT KOPI

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Duta Sahabat Kopi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 10 Januari 2023, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut serta rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Vinna Widjaja selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

#### PT DUTA SAHABAT KOPI

Graha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza – Blok A-8, Jl. Suryopranoto 2,  
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,  
Likuidator  
Vinna Widjaja

### PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT MITRA MEMBANGUN SEJAHTERA

Berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat PT Mitra Membangun Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 10 Januari 2023, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut serta rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Yesi Yesaya Wibiksana selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

#### PT MITRA MEMBANGUN SEJAHTERA

Graha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza – Blok A-8, Jl. Suryopranoto 2,  
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,  
Likuidator  
Yesi Yesaya Wibiksana